

Kepentingan Jerman Melalui Program FORCLIME Dalam Penanganan Deforestasi di Kalimantan (2010- 2016)

Tommy Joko Putra¹⁾, Sukma Sushanti²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

¹⁾²⁾³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: tommyjoko96@gmail.com¹⁾, sukmasushanti@gmail.com²⁾, kawitriresen@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This research aims to analyze German's national interests in Kalimantan Forest by FORCLIME in 2010-2016. Germany as an Annex I country has an obligation to reduce emissions resulting from its industrial activities. REDD+ mechanism allows Germany to reduce its emissions by cooperating with other countries and also maintaining its economic stability resulting from domestic industrial activities. In 2009, Germany reached an agreement with Indonesia of REDD+ implementation by FORCLIME in Kalimantan Forest, which had the highest deforestation rate compared to other forests in Indonesia. FORCLIME has an impact on changing the policies of forest management in Kalimantan. The Regional Government of Kalimantan no longer has full authority over forest management after the establishment of a Forest Management Unit (KPH).

Keywords: REDD+, FORCLIME, Germany's interests in Kalimantan Forest

1. PENDAHULUAN

Isu lingkungan telah menjadi perhatian dunia internasional dalam beberapa dekade terakhir. Upaya untuk menjaga lingkungan telah dilakukan dalam berbagai bentuk usaha seperti kerja sama regional, bilateral dan upaya yang dilakukan pemerintah beserta masyarakat yang terlibat dalam menghadapi masalah lingkungan di negaranya. Kerja sama bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara (Holsti, 1987: 362). Masalah lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama membutuhkan kerja sama berbagai

pihak terkait, kerja sama ini bisa berbentuk bantuan dari negara maju ke negara berkembang. Bantuan yang diberikan bisa berupa dana kelola ataupun bantuan teknis pengelolaan lingkungan.

Kerja sama lingkungan yang dilakukan tidak lepas dari upaya negara-negara maju untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Masih lemahnya kemampuan negara-negara berkembang untuk menyelesaikan masalah lingkungan di negaranya menjadi celah bagi negara maju untuk menawarkan bantuan dengan memiliki maksud untuk mencapai keuntungan, baik di bidang ekonomi maupun mempengaruhi kebijakan negara yang menerima bantuan.

Negara maju juga melihat kerja sama lingkungan dengan negara berkembang sebagai upaya untuk melindungi kegiatan industri di negaranya tetap berjalan. Salah satu negara maju yang melakukan kerja sama lingkungan dengan negara-negara berkembang dalam menghadapi masalah lingkungan adalah Jerman..

Sebagai salah satu negara industri maju di dunia, Jerman terlihat hirau terhadap masalah lingkungan, salah satu buktinya adalah Jerman turut meratifikasi Protokol Kyoto. Sebagai anggota Annex I, Jerman dan negara-negara besar lainnya seperti Amerika, Inggris, Jepang dan China diwajibkan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 5,2 persen pada periode 2008-2012 (UNFCCC, 2011). Namun, Jerman yang masih belum mampu mengurangi secara signifikan tingkat emisi dalam negerinya membuat Jerman mengambil langkah alternatif menggunakan mekanisme REDD+ melalui kerjasama dengan negara-negara berkembang yang memiliki masalah lingkungan di negaranya.

Jerman dan Indonesia pada tahun 2009 menandatangani kerja sama terkait implementasi REDD+ di Kalimantan. Hasil dari kerja sama tersebut menetapkan Jerman memberikan bantuan senilai 20 juta Euro dalam periode 2010 hingga 2020 mendatang (Kemlu, 2009). Kerja sama teknis dan keuangan ini bertujuan untuk membantu Indonesia mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan. Dari hasil kerja sama tersebut terbentuklah Program Hutan dan Perubahan Iklim – *Forest and Climate Change*

Programme (FORCLIME) yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian Kehutanan Indonesia, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) sebagai badan dari Pemerintah Jerman terkait kerja sama internasional dan KfW Entwicklungsbank (KfW) untuk kerja sama finansial (FORCLIME, 2009).

FORCLIME memiliki sasaran untuk memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi akibat degradasi dan deforestasi hutan di Kalimantan, serta melakukan konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon, sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Unsur-unsur utama dari modul kerja program FORCLIME berfokus pada pembentukan operasional dan struktur tata kelola untuk pengelolaan hutan lestari, seperti pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pengaturan pengelolaan kolaboratif untuk kawasan hutan lindung. FORCLIME juga berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan, strategi, dan memberikan pengalaman praktis agar program pengelolaan hutan di Kalimantan dapat berjalan dengan baik (FORCLIME, 2009).

Keinginan Jerman dalam melakukan kerja sama dengan Indonesia di bidang lingkungan tidak lepas dari upaya Jerman untuk mengurangi emisi GRK sesuai dengan perjanjian Protokol Kyoto. Dalam bidang perdagangan, hubungan Jerman dan Indonesia dapat terbilang cukup erat karena Indonesia sendiri merupakan negara pengekspor minyak kelapa sawit (CPO)

terbesar bagi Jerman, diikuti Malaysia dan India. Data Kementerian Pertanian mencatat bahwa Indonesia rata-rata mengekspor 250.000 ton minyak kelapa sawit (CPO) ke Jerman setiap tahunnya (Pertanian, 2016). Jerman yang merupakan negara industri sangat bergantung terhadap minyak kelapa sawit (CPO) untuk memenuhi kebutuhan industri biofuel, yang persinya mencapai 65 persen, dan sisanya 35 persen bagi kebutuhan baku industri makanan (WWF, 2016).

Program FORCLIME bagi Jerman dapat digunakan untuk melindungi kegiatan industrinya dari ancaman dunia internasional terkait emisi yang dihasilkan dan akan menguntungkannya dalam menjaga eksistensi hubungan kerja sama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang kepentingan Jerman di Indonesia dalam FORCLIME yang dilaksanakan dari tahun 2010-2016. Pelaksanaan FORCLIME di hutan Kalimantan menjadi langkah Jerman untuk mencapai kepentingan nasionalnya khususnya di bidang ekonomi.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua tulisan ilmiah sebagai kajian pustaka. Tulisan pertama merupakan tulisan dari Benno Pokorny tahun 2015 yang berjudul *German Bilateral Development Cooperation in The Forest Sector: The Democratic of The Congo*. Tulisan Pokorny (2015) membahas mengenai implementasi kerja sama antara

Jerman dalam menghadapi masalah deforestasi yang terjadi di hutan Kongo. Jerman yang merupakan salah satu negara pendonor terbesar terhadap Kongo, khususnya di bidang pengelolaan hutan, telah memberikan dana sebesar 54 juta dollar AS pada periode 2002-2012 (Worldbank, 2014). Kerja sama ini sangat penting bagi Kongo melihat hutan Kongo yang telah mengalami deforestasi akibat dari maraknya illegal logging dan minimnya pengelolaan hutan. Kerja sama ini tidak hanya berupa bantuan dana, namun juga berupa bantuan teknis berupa program PBF (*Programme for Conservation of Biodiversity and Sustainable Forest Management*). Fokus utama dari program ini yaitu melindungi keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan Kongo, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Pokorny (2015) menyebutkan bahwa dalam implementasi kerja sama Jerman di hutan Kongo telah memberikan keuntungan bagi Jerman. Keuntungan yang didapatkan yaitu banyaknya tenaga kerja yang berasal dari Jerman ditempatkan di Kongo untuk mengawasi agar program pengelolaan hutan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Jerman. Pada tahap perencanaan program pengelolaan hutan di hutan Kongo, tenaga kerja dan pegawai administrasi program ini didominasi oleh tenaga kerja dari Kongo itu sendiri. Namun, setelah dilakukannya evaluasi, Jerman menemukan bahwa tenaga kerja Kongo tidak kompeten dalam menjalankan program ini dengan baik dan juga terjadi tindakan korupsi yang menyalahgunakan dana hibah yang diberikan

Jerman sehingga program pengelolaan hutan tidak berjalan dengan baik, meskipun evaluasi yang dilakukan Jerman terkait masalah ini bersifat tidak transparan. Mengatasi permasalahan ini, Jerman mendatangkan tenaga kerja dan staf ahli langsung dari Jerman.

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Jerman dalam kerja sama pengelolaan di hutan Kongo memberikan keuntungan bagi Jerman, terutama memperluas lapangan kerja bagi warga negaranya. Pertukaran informasi di bidang pengetahuan dan teknologi terkait hutan tropis juga merupakan nilai tambah untuk mencapai kepentingan nasional Jerman. Jerman juga secara tidak langsung telah mempengaruhi kebijakan Kongo terkait pengelolaan hutannya. Pengaruh Jerman yang begitu kuat dalam kerja sama ini merupakan dampak dari pentingnya dana bantuan yang diberikan Jerman bagi Kongo. Kerja sama lingkungan ini pada dasarnya menguntungkan bagi kedua negara, Kongo yang membutuhkan dana bantuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan Jerman dapat mengurangi emisi GRK tanpa mengganggu kegiatan industrinya di negaranya sendiri.

Tulisan kedua yang digunakan dalam penelitian ini berjudul *“Developed Country Policies to Environmental Degradation in South”* oleh Vikas Nath tahun 2001. Tulisan Vikas Nath (2001) membahas mengenai keinginan negara-negara maju untuk terlibat dalam permasalahan lingkungan di negara-negara berkembang tidak lepas dari kerangka pemikiran bahwa lebih mudah mengubah

kebijakan di negara-negara berkembang dibanding mengubah kebijakan domestiknya sendiri dalam upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan demi menjaga citra mereka di mata internasional. Negara-negara yang bergantung pada kegiatan industrinya lebih memilih mencari solusi keluar negaranya untuk upaya melindungi lingkungan daripada mengubah kebijakan domestiknya. Negara-negara berkembang yang hutan tropisnya mengalami degradasi merupakan sasaran investasi bagi negara-negara maju untuk menghindari tuduhan dari dunia internasional bahwa kegiatan industrilah yang memiliki dampak parah terhadap kerusakan lingkungan. Negara seperti Amerika Serikat, lebih memilih aktivitas penebangan di Hutan Amazon ditiadakan daripada mengurangi peternakan sapi untuk menyediakan stock daging bagi Mc. Donald's di negaranya sendiri. Negara-negara berkembang mengalami dilema dalam menemukan solusi dalam permasalahan ini, yakni mengurangi kerusakan lingkungannya atau meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Vikas Nath (2001) menyebutkan bahwa upaya negara berkembang dalam mengatasi dilema tersebut, juga dihadapkan pada dua masalah fundamental, yaitu masalah perekonomian dan kedaulatan negara. Situasi ini akan memperjelas kesenjangan antara negara maju dan berkembang serta menjadikan permasalahan ini menjadi konfliktual, dikarenakan setiap negara memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masalah ekonomi politik. Ketimpangan posisi tawar antara negara maju dan berkembang mengakibatkan negara

berkembang harus siap dengan besarnya pengaruh negara maju terhadap penerapan kebijakan domestik di negara berkembang. Salah satu pengaruh yang harus diterima oleh negara berkembang dari negara maju yaitu bantuan lingkungan, dikarenakan negara berkembang belum memiliki kemampuan yang besar untuk memperbaiki lingkungannya secara mandiri. Pemberian bantuan asing dalam perbaikan lingkungan dapat dianalisis untuk melihat seberapa besar implikasinya dan prediksi hubungan antara negara yang bekerja sama kedepannya, misalnya di bidang perdagangan.

Berdasarkan kedua tulisan diatas, penelitian ini mengkaji bahwa konsep kerjasama internasional dan kepentingan nasional dapat digunakan dalam menggambarkan kepentingan Jerman dalam kerjasamanya dengan Indonesia dalam penerapan REDD+ di Hutan Kalimantan melalui FORCLIME pada periode 2010-2016.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan kepentingan Jerman melalui FORCLIME dalam penanganan deforestasi di Hutan Kalimantan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi berupa literatur seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar elektronik, situs pemerintah terkait atau informasi yang diperoleh dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan yaitu kepentingan nasional sebuah negara dalam penanganan suatu isu di negara lain.

Penelitian ini menggunakan unit analisis negara. Unit analisis ini digunakan untuk melihat serta menganalisis Kepentingan negara Jerman dalam kerja sama lingkungan akan menjadi fokus penelitian ini. Struktur dan sistem politik Jerman yang memungkinkan Jerman melakukan kerja sama dengan negara yang mempunyai kerusakan hutan seperti di Kalimantan, Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan kajian kepustakaan, yaitu dengan mencari data maupun informasi pada buku, jurnal, berita, situs web dan lain sebagainya. Data yang telah dihimpun disajikan dalam bentuk uraian singkat, gambar dan lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 FORCLIME sebagai media Jerman mencapai agenda kepentingannya

Deforestasi dan degradasi hutan merupakan salah satu faktor penting dalam menyebabkan pemanasan global. Permasalahan hutan banyak terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis seperti Brazil, Kongo, Kamerun dan Indonesia. Biaya yang cukup besar dan juga keterbatasan negara-negara tersebut menjadi penghambat dalam mengatasi permasalahan hutan di negaranya. Hal ini kemudian menjadi celah bagi negara-negara maju untuk terlibat dalam pengelolaan hutan di negara-negara berkembang dengan menawarkan bantuan berupa dana maupun investasi melalui kerja sama internasional. Joseph Greico (1990) memaparkan bahwa kerja sama internasional baik berupa bilateral maupun multilateral

terbentuk karena adanya kepentingan-kepentingan nasional dari negara-negara yang terlibat. Isu-isu internasional dan permasalahan di suatu negara dapat menjadi alasan mengapa sebuah kerjasama dilakukan. Permasalahan lingkungan seperti deforestasi dan degradasi hutan merupakan isu yang digunakan negara maju untuk melakukan kerja sama dengan negara-negara berkembang yang belum mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan di negaranya.

FORCLIME yang terbentuk dari hasil dari kerja sama antara Jerman dan Indonesia untuk mengatasi deforestasi dan degradasi Hutan Kalimantan merupakan upaya Jerman untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) negaranya melalui mekanisme alternatif yang ditawarkan oleh Protokol Kyoto. Mekanisme REDD+ ditawarkan oleh Protokol Kyoto kepada negara-negara yang memiliki industri maju untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang yang belum mampu mengatasi deforestasi dan degradasi hutan di negaranya. Melalui mekanisme ini, Jerman dan Indonesia sepakat untuk memilih Hutan Kalimantan sebagai wilayah penerapan REDD+. Alasan kedua negara untuk memilih Hutan Kalimantan sebagai wilayah penerapan REDD+ adalah deforestasi dan degradasi yang terjadi di Hutan Kalimantan merupakan yang paling memprihatinkan dibandingkan hutan-hutan lainnya di Indonesia.

Bantuan dana yang diberikan Jerman dalam kerja samanya dengan Indonesia tidak sepenuhnya hanya berasal dari Jerman,

namun juga berasal dari Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan hasil kerja sama antara Jerman dan Indonesia terkait program FORCLIME, Jerman memberikan bantuan dana hibah sebesar 20 juta Euro dan 10 persen dana pendamping dari Pemerintah Indonesia yang berasal dari APBN Indonesia selama periode pelaksanaan program (Kemenkumham, 2012). Dana bantuan yang diberikan kepada Indonesia tidak sebesar dana yang diberikan kepada Kongo untuk program pengelolaan hutannya. Hal ini dikarenakan kerja sama antara Jerman dan Indonesia terkait pengelolaan hutan masih tergolong baru. Jerman melihat tindakan ini untuk meminimalisir kerugian akibat korupsi yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap dana bantuan yang diberikan oleh Jerman.

Selain bantuan dana, Jerman juga memberikan bantuan teknis untuk membantu Pemerintah Daerah di wilayah program di Kalimantan dalam membentuk kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan hutan. Mekanisme REDD+ merupakan hal yang relatif baru bagi Indonesia, sehingga pengembangan kapasitas melalui pelatihan terhadap masyarakat yang terlibat merupakan faktor utama dalam implementasi program FORCLIME. Semua pihak yang terkait dengan kegiatan FORCLIME merupakan sasaran peningkatan kapasitas untuk memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pengelolaan hutan. Jerman dalam program ini menyediakan tenaga ahli dan staff untuk membantu kegiatan pelatihan terkait pengelolaan hutan (FORCLIME, 2010). Jerman dapat memperoleh keuntungan dalam

bantuan teknisnya kepada Indonesia karena tenaga ahli yang berasal dari Jerman di kemudian hari mendapatkan pengetahuan baru dari penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap hutan tropis Indonesia.

Penerapan REDD+ di Hutan Kalimantan melalui program FORCLIME tentunya menghasilkan beberapa kebijakan baru dalam pengelolaan hutan. Jerman sebagai negara yang memberikan bantuan, memastikan dana yang diberikan untuk pengelolaan hutan dipergunakan baik yaitu dengan ikut menentukan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan FORCLIME. Kebijakan-kebijakan baru inilah yang kemudian dapat menjadi celah bagi Jerman untuk mencapai kepentingannya dalam kerja sama ini. Pengaruh Jerman yang cukup kuat tidak lepas dari posisi tawar Jerman yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang merupakan negara penerima bantuan. Vikas Nath (2001) memaparkan bahwa ketimpangan posisi tawar dalam sebuah kerja sama antara negara maju dan negara berkembang, misalnya di bidang lingkungan mengakibatkan negara berkembang harus siap dengan besarnya pengaruh negara maju terhadap penerapan kebijakan domestik negara berkembang. Setiap pembuatan kebijakan yang dipengaruhi oleh Jerman terhadap pelaksanaan program FORCLIME di Hutan Kalimantan tentunya akan menguntungkan pihak Jerman.

Penerapan REDD+ di Hutan Kalimantan melalui FORCLIME juga telah banyak mengubah beberapa kebijakan-

kebijakan Pemerintah Daerah di wilayah program pengelolaan hutan. Kebijakan yang sebelumnya memberikan kendali yang cukup besar terhadap Pemerintah Daerah berubah setelah dibentuknya FORCLIME. Pembentukan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) membuat Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kendali penuh terhadap pengelolaan hutan, namun masyarakat di sekitar wilayah Malinau, Berau di Kalimantan Timur dan Kapuas Hulu di Kalimantan Barat serta para pemangku adat diberikan kendali lebih besar untuk pengelolaan hutan (FORCLIME, 2009). FORCLIME mengajak masyarakat di sekitar wilayah hutan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan hutan. Hal ini dapat dilihat sebagai langkah Jerman untuk memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan melalui FORCLIME untuk mengupayakan kepentingan nasionalnya.

FORCLIME juga akan melakukan intervensi di dalam masyarakat yang bermukim di wilayah kawasan REDD+ untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Intervensi ini lebih spesifik pada lokasi tergantung kebutuhan dan kondisi masyarakat, bahkan di dalam salah satu kawasan program, dapat diidentifikasi intervensi-intervensi yang berbeda untuk peningkatan mata pencaharian. Misalnya, masyarakat di dalam kawasan program perlu didukung dalam hal ketahanan pangan, sementara kebutuhan masyarakat di desa lainnya perlu didukung dalam hal pengembangan produk dan pemasaran komoditi mereka seperti karet, madu dan kerajinan tangan atau bahkan ekowisata (Gaiser, 2015). Penulis menganalisa

kebijakan ini dapat menguntungkan Jerman dan juga Indonesia. Melalui peningkatan kualitas hasil pertanian Hutan Kalimantan dapat meningkatkan intensitas kerjasama antara Jerman dengan Indonesia terkait impor-ekspor khususnya bahan-bahan mentah yang dihasilkan Hutan Kalimantan dapat memenuhi regulasi impor Jerman yang cukup ketat.

4.2 Komitmen antara Protokol Kyoto dan melindungi industri Jerman

Jerman merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi Protokol Kyoto sebagai partisipasinya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di dunia. Sebagai negara industri, Jerman tergolong menjadi negara Annex 1 yang mewajibkan Jerman mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) negaranya sebesar 5,2 persen pada periode 2008-2012 (UNFCCC, 2011). Jerman sendiri memiliki komitmen untuk menurunkan emisi GRK negaranya sebesar 40 persen di tahun 2020. Upaya Jerman dalam memenuhi komitmen penurunan emisi dalam negerinya seperti mendukung kebijakan teknologi ramah lingkungan, dan penanaman modal pada sumber energi yang dapat diperbaharui. Tahun 2009 tercatat Jerman telah mengurangi emisi GRK negaranya sebesar 23 persen sejak tahun 1990. Jerman juga menggunakan energi yang dapat diperbaharui, seperti biomass, kincir angin dan juga *hydropower* (Worldbank, 2015). Perubahan penggunaan energi yang dilakukan Jerman dapat dilihat sebagai upaya Jerman untuk menunjukkan negaranya

merupakan salah satu negara industri maju yang peduli terhadap lingkungan.

Kebijakan lingkungan yang diterapkan Jerman masih menghadapi hambatan dimana kebutuhan industri Jerman yang sangat bergantung pada energi yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan batu bara. Faktanya, ketergantungan Jerman terhadap energi yang tidak dapat diperbaharui membuat emisi yang dihasilkan Jerman diprediksi dapat bertambah dari tahun ke tahun (Bloomberg, 2011). Upaya domestik yang dilakukan Jerman dalam penurunan emisi GRK belum cukup optimal dikarenakan masih tingginya ketergantungan Jerman terhadap industri di negaranya, terutama industri otomotif.

Untuk mencapai target penurunan emisinya, Jerman kemudian mengambil langkah alternatif yang tertuang dalam Protokol Kyoto, yaitu *Clean Development Mechanism* (CDM). CDM merupakan mekanisme alternatif yang ditawarkan Protokol Kyoto kepada negara Annex 1 untuk mencapai target penurunan emisi negaranya dengan bekerja sama dengan negara berkembang yang sedang mengalami permasalahan lingkungan. *Clean Development Mechanism* (CDM) berfokus pada penurunan emisi GRK yang dihasilkan deforestasi dan degradasi hutan (Massai, 2011: 124). Negara-negara yang tergabung dalam Protokol Kyoto sepakat bahwa deforestasi dan degradasi hutan merupakan salah satu penyumbang emisi GRK terbesar yang berdampak terhadap perubahan iklim.

Upaya Jerman dalam mengurangi emisi GRK negaranya sebenarnya telah terlihat dari adanya perubahan kebijakan-kebijakan domestik yang dilakukan oleh Pemerintah Jerman. Salah satu kebijakan Jerman yang terkenal adalah perubahan untuk menggunakan energi yang dapat diperbaharui (bioenergi). Kebijakan Jerman untuk memberikan subsidi terhadap pertanian yang menggunakan energi matahari dan juga teknologi ramah lingkungan. Namun kegiatan industri Jerman lainnya masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap energi yang dapat mencemari lingkungan, seperti energi fosil. Penggunaan energi yang berasal dari fosil secara berlebihan menyebabkan polusi udara dan juga berdampak buruk pada lingkungan. Kendala ini terbukti oleh emisi karbon yang dimiliki Jerman tidak mengalami penurunan selama 9 tahun belakangan dan emisi yang dihasilkan dari sektor transportasi tidak mengalami perubahan signifikan sejak tahun 1990 (handelsblatt, 2017).

Tingkat emisi karbon sebenarnya dapat dikurangi apabila Jerman bersedia merubah semua energi yang tidak dapat diperbaharui menjadi energi yang dapat diperbaharui. Namun upaya ini tidaklah mudah dan tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan biaya sebesar \$ 580 juta yang telah dikeluarkan Jerman untuk merombak sebagian sistem energinya tidak berpengaruh besar dalam menurunkan emisi karbon negaranya (Bloomberg LP, 2017). Perubahan industri secara besar-besaran juga dapat berpengaruh terhadap stabilitas produksi dan ekspor Jerman, mengingat Jerman sangat bergantung terhadap sektor industrinya.

Kepentingan ekonomi merupakan faktor penting dalam membentuk kebijakan suatu negara untuk melakukan kerja sama dengan negara lain, baik itu kerja sama ekonomi, militer maupun lingkungan. Nuechterlein (1976) memaparkan bahwa kepentingan nasional suatu negara dapat dicapai melalui kerja sama dengan negara lain dengan tujuan dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian negara tersebut. Kerja sama Jerman dengan Indonesia yang menghasilkan FORCLIME bertujuan untuk mengelola Hutan Kalimantan yang mengalami degradasi dan deforestasi tidak semata-mata sebagai bentuk kepedulian Jerman terhadap lingkungan, namun juga sebagai upayanya untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Jerman yang belum mampu mengurangi emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan industrinya dan sangat jauh dari target pengurangan emisi yang telah ditetapkan memilih untuk menggunakan skema REDD+ demi melindungi kegiatan industrinya. Jerman menyadari biaya yang dikeluarkan untuk merombak secara keseluruhan energi dan industrinya sangat besar serta menyebabkan stabilitas ekonominya terganggu, terutama di bidang produksi. Langkah Jerman tersebut dinilai sebagai solusi terbaik yang dimiliki Jerman untuk mencegah kecaman dari dunia internasional terhadap industri Jerman yang mencemari lingkungan.

FORCLIME tidak hanya sebagai upaya Jerman untuk meningkatkan hubungan dagangnya dengan Indonesia, namun juga sebagai upaya Jerman untuk mencapai komitmen negaranya untuk mengurangi emisi

GRK dan juga dipandang di mata dunia sebagai negara industri maju yang peduli terhadap lingkungan. Menurut penulis, mekanisme alternatif yang ditawarkan oleh Protokol Kyoto dapat disalahgunakan oleh negara-negara maju demi mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Negara maju seperti Jerman tentunya lebih memilih untuk memberikan bantuan dana kepada negara-negara berkembang untuk pengelolaan hutannya dibandingkan merombak secara besar-besaran energi dan kegiatan industrinya. Mengubah energi fosil menjadi energi yang dapat diperbaharui secara masif dan mendadak sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi Jerman.

FORCLIME memberikan jalan bagi Jerman untuk bebas melanjutkan kegiatan industrinya yang penuh polusi walaupun emisi GRK yang dihasilkan dari sektor tersebut sangat tinggi. Melalui skema REDD+ ini, Jerman tidak perlu mengorbankan industri yang dimilikinya dengan membayar kewajibannya kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia yang hutannya mengalami deforestasi dalam bantuan berupa dana dan bantuan teknis. Jerman tetap bisa membuang emisi negaranya dengan penggunaan energi dan kegiatan industri yang mencemari lingkungan karena Jerman telah membayar kompensasinya. Tindakan ini juga membuat Jerman yang merupakan negara industri maju menjadi baik di mata dunia, karena dianggap sebagai negara maju yang peduli terhadap lingkungan. Hal ini juga memberikan tambahan waktu bagi Jerman untuk secara perlahan mengubah

penggunaan energi dalam negaranya menjadi secara sepenuhnya menjadi energi yang ramah lingkungan.

4.3 Kepentingan Jerman Melalui FORCLIME di Indonesia

Suatu Negara memiliki power yang dapat mempengaruhi negara lain dan memiliki kontrol terhadap arah kebijakan negara lain. Karen Mingst (2008) menjelaskan bahwa power suatu negara secara efektif memberi pengaruh terhadap hasil kerja sama suatu negara dengan yang lain tergantung potensi power yang dimiliki masing-masing negara yang melakukan kerja sama. Semakin kuat potensi power yang dimiliki negara tersebut, maka semakin kuat pula pengaruhnya terhadap negara yang diajak bekerja sama. Potensi power suatu negara tergantung pada elemen-elemen yang membentuk power tersebut, seperti bagaimana negara tersebut mengolah potensi yang dimiliki negaranya sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Misalnya Jepang yang tidak kaya akan sumber daya alam namun dapat mengolah potensi negaranya sehingga menjadi salah satu negara maju di dunia. Hal serupa juga dapat dilihat dari Jerman yang merupakan negara landlock namun memiliki perekonomian yang sangat maju dibanding negara-negara di sekitarnya, bahkan menjadi salah satu negara teratas yang perekonomiannya maju.

Jerman merupakan salah satu negara teratas di dunia yang memiliki perekonomian maju. Walaupun secara geografis Jerman diapit oleh negara-negara besar Eropa dan tidak kaya akan sumber daya alam, Jerman

mampu bersaing dengan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia dan Inggris. Kemajuan perekonomian Jerman tidak lepas dari majunya industri dan teknologi yang dimiliki Jerman dan didukung pemasaran global yang sangat baik. Hal ini didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia yang disertai dengan kualitas pendidikan Jerman yang menjadi salah satu terbaik di dunia.

Perekonomian Jerman sangat bergantung pada kegiatan industri yang dimilikinya. Hal inilah yang kemudian menjadi element of power Jerman sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan negara lain melalui kerja sama. Untuk menyokong perindustriannya, Jerman membutuhkan bahan-bahan mentah seperti kelapa sawit yang mampu diproduksi oleh negara-negara yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia, Brazil dan Kongo. Selain dipergunakan sebagai bahan konsumsi masyarakat Jerman, minyak kelapa sawit (CPO) juga sangat penting bagi kegiatan perindustrian Jerman dan juga untuk diaplikasikan dalam penerapan bioenergi.

Biaya konsumsi warga negara Jerman juga cenderung stabil karena rendahnya tingkat hutang pribadi dan pengangguran, sehingga membuat Jerman menjadi negara di Eropa yang menggunakan produk-produk lokal dan pemasaran yang baik didukung oleh populasi yang stabil. Namun, beberapa tahun belakangan akibat banyaknya pengungsi yang bermigrasi ke Jerman, menyebabkan Jerman harus mengambil solusi untuk menghindari ledakan

penduduk dan juga konflik yang ditimbulkan oleh kesenjangan sosial. Jerman harus membuka lowongan kerja yang lebih luas lagi untuk menjaga negaranya tetap stabil.

Kebijakan Jerman dalam melakukan kerja sama dengan negara-negara berkembang melalui mekanisme penerapan REDD+ melalui Protokol Kyoto merupakan salah satu upaya Jerman untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kerja sama Jerman dengan Indonesia yang menghasilkan program FORCLIME yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan deforestasi dan degradasi di Hutan Kalimantan menjadi media bagi Jerman untuk masuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan hutan di Kalimantan. Nuechterlein (1976) menyebutkan bahwa kepentingan ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong suatu negara untuk melakukan kerja sama dengan negara lain. FORCLIME dapat memberikan keuntungan bagi Jerman terkait upayanya meningkatkan hubungan dengan mitra dagang negaranya. Selain itu, Jerman juga membutuhkan bahan-bahan mentah yang dihasilkan dari Hutan Indonesia, terutama Kalimantan. FORCLIME juga dapat menjadi langkah alternatif Jerman untuk melaksanakan kewajibannya sebagai negara Annex I untuk mengurangi emisi GRK negaranya tanpa mengurangi kegiatan industri dalam negaranya.

5. KESIMPULAN

Permasalahan atau isu dalam suatu negara dapat menjadi celah bagi negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini dapat kita lihat dari Jerman yang

memanfaatkan kerja samanya dengan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya, terutama di bidang ekonomi. FORCLIME yang terbentuk dari hasil kerja sama Jerman dan Indonesia tidak hanya sebagai bentuk komitmen Jerman untuk mengurangi emisi Gas Rumah kaca di dunia, namun juga sebagai upaya Jerman untuk memperoleh keuntungan di bidang ekonomi. Melalui FORCLIME Jerman dapat berpengaruh terhadap pembuatan dan perubahan kebijakan-kebijakan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan hutan.

Pengaruh Jerman dalam pembuatan ataupun perubahan kebijakan pengelolaan Hutan Kalimantan tidak lepas dari power yang dimiliki Jerman dalam bentuk bantuan dana yang dibutuhkan Indonesia. Dengan bantuan dana tersebut, Jerman memiliki nilai tawar yang kuat dalam hasil kerjasamanya dengan Indonesia. Kebijakan-kebijakan pengelolaan Hutan Kalimantan yang mengalami perubahan menunjukkan secara tidak langsung Jerman telah memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan di Indonesia dan hal ini juga menunjukkan Jerman telah mencampuri kedaulatan Indonesia. Indonesia yang merupakan negara berkembang dan membutuhkan dana bantuan dari Jerman untuk mengelola hutannya, tidak dapat berbuat banyak karena posisi tawarnya yang rendah dibandingkan Jerman.

Melalui kerja samanya dengan Indonesia yang menghasilkan program FORCLIME, Jerman memiliki kepentingan-kepentingan yang menguntungkan negaranya, terutama di bidang ekonomi.

Jerman melihat kerja sama lingkungan dengan Indonesia sebagai langkah untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara terutama di bidang ekspor-impor. Sangat penting untuk menjaga hubungan dengan mitra dagang bagi Jerman terutama Indonesia sebagai pengekspor bahan-bahan mentah, seperti kelapa sawit, coklat dan Indonesia juga merupakan target pasar bagi produk-produk industri Jerman, seperti otomotif, manufaktur, pesawat terbang, bahkan juga kebutuhan militer. Berdasarkan data ekspor-impor menunjukkan bahwa Jerman selalu mengalami surplus dalam berdagang dengan Indonesia karena perbedaan harga dan kualitas yang ditawarkan masing-masing negara. FORCLIME menjadi upaya Jerman untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan sekaligus melindungi industrinya dari kecaman dunia internasional. Jerman juga dapat membentuk citranya di mata dunia agar dapat terlihat sebagai negara industri maju yang seakan peduli terhadap lingkungan. Kegagalan Jerman untuk memenuhi targetnya dalam mengurangi emisi karbon yang dihasilkan industrinya dapat tertutupi oleh kerjasamanya dengan negara lain terkait pengelolaan lingkungan. Dengan ini Jerman mendapatkan waktu tambahan untuk mencari solusi lain untuk mengurangi emisi negaranya secara perlahan tanpa mengorbankan kegiatan industrinya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Bloomberg (2017). *Germany's Failed Climate Goals*. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018 melalui website: <https://www.bloomberg.com/graphics/2018-germany-emissions/>

- Economist (2016). *What Germany Offers The World*. Diakses pada tanggal 15 Januari melalui website: <https://www.economist.com/briefing/2012/04/14/what-germany-offers-the-world>
- Federal Ministry for Economic Development. (2015). *REDD+: Protecting Forests and Climate for Sustainable Development*. Diakses pada tanggal 23 Mei 2018 melalui website: http://www.bmz.de/en/publications/topics/countries_regions/Materialie250_redd.pdf
- FORCLIME. (2009). *About FORCLIME*. Diakses pada tanggal 12 Juni 2018 melalui website: <http://www.forclime.org/index.php/en/homeen/about-forclime>
- Gaiser, Nina-Maria. (2017). *Potret Perubahan FORCLIME*. (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
- Greico, Joseph. (1990). *Cooperation Among Nation, Europe, America & Nontariff Barriers to Trade*. (New York: Cornell University Press)
- Gupta, Joyeeta. (2013). *Climate Change, Forest and REDD*. (New York: Routledge)
- Handelsblatt. (2017). *Germany's Great Environmental Failure*. Diakses pada tanggal 18 Desember 2018 melalui website: <https://www.handelsblatt.com/today/politics/climate-emergency-germanys-great-environmental-failure/23583678.html?ticket=ST-2236435-iUCKHZcq2Ar9OXrRxtzf-ap5>
- Kemendag. (2012). *Market Brief Minyak Nabati / Minyak Kelapa Sawit di Jerman*. Diakses pada tanggal 7 Januari 2019 melalui website: <http://djpen.kemendag.go.id/membership/data/files/4b141-12.market-brief-vegetable-oil.pdf>
- Kemenkumham. (2012). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan tahun 2012*. Diakses pada tanggal 18 Desember 2018 melalui website: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn630-2012lamp.pdf>
- Kemlu. (2012). *"Jakarta Declaration" Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive Partnership*. Diakses pada tanggal 6 Januari 2019 melalui website: <https://www.kemlu.go.id/Documents/Deklarasi/Jakarta%20Declaration.pdf>
- Krisnawati, H. (2015). *Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan dari Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan*. (Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan)
- Mas'oed, Mohtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada)
- Mingst, Karen A. (2008). *Essentials of International Relations*. (New York: W. W. Norton & Company, Inc.)
- Nuechterlein, Donald E. (1976). *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making*. British Journal of International Studies
- Nath, Vikas. (2001). *Developed Country Policies to Environmental Degradation in South*. London School of Economics
- OECD. (2012) *Green Growth in Action: Germany*. Diakses pada tanggal 12 Juni 2018 melalui website: <http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthinactiongermany.htm>
- Pistorius, Till. (2014). *The Politics of German Finance for REDD+*. Center for Global Development
- Pokorny, B. (2015). *German Bilateral Development Cooperation in The Forest Sector: The Democratic of The Congo*. (Germany: University of Freiburg)
- UNFCCC. (2016) *Second Biennial Reports – Annex I*. Diakses pada tanggal 21 Juni 2018 melalui website: <https://unfccc.int/process/transparenc>

y-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/national-communications-and-biennial-reports-annex-i-parties/biennial-report-submissions/second-biennial-reports-annex-i

- World Bank. (2011) *Green Growth Policies: Germany*. Diakses pada tanggal 12 Juni 2018 melalui website: http://siteresources.worldbank.org/EC/AEXT/Resources/258598-1284061150155/7383639-1323888814015/8319788-1324485944855/16_germany.pdf
- WWF. (2014). *Palm Oil Report Germany*. Diakses pada tanggal 18 Januari 2019 melalui website: https://mobil.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Report_Palm_Oil_-_Searching_for_Alternatives.pdf